

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Arba H.M. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Adnan Indra Muchlis. *Negara Hukum Dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.
- Suhariyanto Didik, dkk. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Sumatera Barat: CV Gita Lentera, 2024.
- Dunggio Swastiani, abdussamad Juriko. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Gorontalo: Cahaya Arsh, 2024.
- Fakhruddin, Razy. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara. Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum*. Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020.
- Fardiansyah Hardi, Rizkia Nanda Dwi. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2023.
- Farhani Athari, dkk. *Hukum Konstitusi Pilar Demokrasi Dan Kekuasaan Negara*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Haudi. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Sumatera Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2021.
- Jaidun. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Samarinda: Prenada Media Grup, 2021.
- Junaedi Karso, A. *Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2016.
- Junaedi, Karso A. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.
- Junaidi, Dkk. *Hukum Agraria*. Sumatera Barat: CV Gita Lentera, 2023.
- Marzuki Peter Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Kencana.: Prenada Media, 2021.
- Mushafi. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Probolinggo: Eureka Media Aksara, 2025.
- Muwahid. *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Jawa Timur: CV Duta Media, 2020.

- Paramitha, Amelia Ayu, Dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Permadi Iwan. *Unifikasi Dan Plurarisme Hukum Agraria*. Malang: Gunung Samudera, 2017.
- Permatasari Putri Yuli, Mukhidin, Widyastuti Tiyas Vika. *Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Udara*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2024.
- Pramono Joko. *Otomatisasi Tata Kelola Sarana Dan Prasarana SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Manajemen Perkantoran. Kompetensi Keahlian Otomatis Dan Tata Kelola Perkantoran*. Yogyakarta, 2021.
- Rahiman, Dani. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2024.
- Rezah, Farah Syah, dkk. *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan Rechtsstaat or Machtstaat*. Makassar: CV Social Politic Genius, 2018.
- Rianto, Yayan. *Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Sri, Rahayu Ani. *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Subekti Rahayu. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: K-Media, 2023.
- Sulaksono. *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: CV Jakat Media Publishing, 2023.
- Sumardi, Gozali Djoni. *Hukum Pengadaan Tanah Di Indonesia Pengaturan Dan Prosedur Serta Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jawa Barat: PT Citra Aditya Bakti, 2019.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Unigres Press, 2023.
- Mustanir Ahmad, Dkk. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2023.
- Agus, Jatmiko. *A Sampai Z Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Permasalahan Dan Solusinya*. Yogyakarta: Deepublish Publisher CV Budi Utama, 2022.
- Burhanuddin. *Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary*. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2022.
- Freddy, Efendi Aan Dan Poernomo. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

K. Harjono, Dhaniswara. “Tanggung Jawab Penilai Dalam Pengadaan Tanah Bagi Laritmas Selfianus, Rosidi Ahmad. *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2024.

THESIS, SKRIPSI, JURNAL

Tiana, A. (2024). Pemeriksaan Sengketa Khusus Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia*, 1(4), 60-71.

Ajeng Ayu, Abdul Atsar. “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Kilat (Studi Putusan Nomor: 4/Pdt.Sus-Hki/ Merek/2019/Pn-Niaga.Sby).” *Jurnal Commerce Law* 3, no. 1 (2023): 1–22.

Noor, A., Hermindo, H., Setiawati, Y., Wijaya, M., & Rohmani, R. (2024). Dimensi Hukum Pembebasan lahan: Hak, Peraturan, Dan Reformasi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 184-201.

Berliani, Annisa, Sudi Fahmi, Program Pascasarjana, Magister Ilmu, and Universitas Lancang Kuning. “Kepentingan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif” 7, no. 1 (2024): 253–71.

Effendry. “Penetapan Ganti Rugi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat 2.” *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2025): 1–13.

Fath, A., & Fawwaz, R. (2024). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pulau Rempang ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia. *Forschungsforum Law Journal*, 1(01), 31-40.

Gunawan, Indra. “Kajian Model Bisnis untuk Pengelolaan Kawasan Stasiun Mrt Jakarta Beserta Aturan Hukum Pemanfaatan Ruang Yang Diperlukan.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 6 (2022): 2233–49.

Hadi, Fikri. “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia The State of Law and Human Rights in Indonesia.” *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88.

Hambali, Ferdi Rifanda, Sutaryono Sutaryono, and Sukmo Pinuji. “Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Sumenep.” *Tunas Agraria* 4, no. 3 (2021): 276–92. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.164>.

Harahap, M. A., Husni, H., & Bahreisy, B. (2024). Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Waduk Krueng Keureuto Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas*

Malikussaleh, 7(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i1.14819>

- Hermawan, Adellya Salsabilla. “Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik.” *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan 2*, no. 3 (2022): 58–67.
- Jannah, S. M., Fanciska, W., & Mau, H. A. (2025). Kepastian Hukum Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(3), 485-496.
- Ian Edward Hamonangan Butar Butar, et,al, “Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012.” *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa 1*, no. 3 (2023): 236–59. <https://doi.org/10.54066/jikma.v1i3.348>.
- K. Harjono, Dhaniswara. “Tanggung Jawab Penilai Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” *Jurnal Hukum Indonesia 2*, no. 1 (2023): 14–24. <https://doi.org/10.58344/jhi.v1i2.7>.
- Khairani, Yuni, and Putri Kemala Sari. “Penerapan Besaran Ganti Rugi Hak Atas Tanah Yang Digunakan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Keadilan.” *Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum) 1*, no. 2 (2023): 94–102. <http://jurnal.utu.ac.id/argumentum>.
- Lutfi Dianto, Affandi. “Konsep Hukum Pengadaan Tanah Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Umum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 27*, no. 20 (2021): 2922–36.
- Sumiati, L., & Rahman, A. (2024). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Private Law*, 4(1), 203-209.
- Narestya, R. A., & Saleh, M. (2025). Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 23(2), 493-501.
- Nuralisha, Marsheila Audrey, and Siti Mahmudah. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5*, no. 1 (2023): 277–90. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364>.
- Prasdhana, Aga, and Miftakhul Huda. “Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.” *Unes Law Review 6*, no. 3 (2024): 8203–11. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Putri, A. B., Cherieshta, J., & Rasji, R. (2024). Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 570-574.

- Putri, M. A. K., Setiawan, Y., & Hidayat, M. (2025). Konflik Agraria Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan: Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Atas Tanah. *Yurisdiksi: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(1), 10-19.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023): 201–22. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781>.
- Rahmadani, R., & Zulyan, Z. (2025). Edukasi Meningkatkan Pemahaman Anak Tentang Peran Pemerintah Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Warga Negara. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 1437-1445.
- Rahmiati, Firman, and Riska Ahmad. "Implementasi Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 10160–65.
- Rangkung, Ashley, and Suparjo Suparjo. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum VS Pelindungan Hak Asasi Manusia: Petani Kalasey Mempertahankan Kebun Terakhir Article Sidebar." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10555.
- Suhartoyo, S. (2021). Analisis Terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(2), 326-338.
- Sahibu, Nurmasita, Ridwan Labatjo, Nasrun Hipan, and Nirwan Moh Nur. "Pencabutan Dan Pembebasan Hak Atas Tanah: Prosedur Dan Implikasinya." *Jurnal Yustisiabel* 7, no.2 (2023): 284–306. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.2870>.
- Sandy Gustiawan Ruhiyat. "Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan*, 2022, 40–58.
- Silalahi, Hotmaria Sariyani, Triono Eddy, and Dayat Limbong. "Analisis Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun)." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11847–56. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Soeprijanto, Troeboes. "Land Reform-Reform Agraria-Redistribusi Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 Uud 1945." *Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 55–66. <https://doi.org/10.26877/civis.v12i1.14461>.
- Sugirman, Andi. "Penguatan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Pancasila Melalui

Administrasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 2024, 103–4. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v23i2.6773>.

Sukma, G. L. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengurangi Kemiskinan Melalui Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sirnabaya Kabupaten Karawang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 445-461.

Yani, M. D., & Yuniawaty, Y. (2025). Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Suku Balik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara. *UNES Law Review*, 7(3), 969-979.

Liani, M. N. H., & Winanti, A. “Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I.” *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2021): 159–72. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19395>.

Nail, M. H. “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi , Besaran Ganti Rugi.” *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020): 169–82.

Prabowo, Roni Imam. “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan SUTT 150 KV Rawalo – Majenang Kabupaten Banyumas),” 2022, 35–40.

K. Harjono, Dhaniswara. “Tanggung Jawab Penilai Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2023): 14–24. <https://doi.org/10.58344/jhi.v1i2.7>.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,”

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,” Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN.1960/No.TLN No.2043, LL SETNEG : 17 HLM

“Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” LN.2012/NO.156, LL SETKAB : 68 HLM

“UU No. 2 Tahun 2012, Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” LN.2012/No. 22, TLN No. 5280, LL SETNEG: 28 HLM

“UU No 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.” LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM

“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad).”BN.2019/No.940, jdih.mahkamahagung.go.id: 10 hlm.
“Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.” LN 2023 (102), TLN (6885): 32 hlm.; jdih.setneg.go.id
SETKAB : 68 HLM

WEBSITE

Website Kabupaten Sumenep. “Ahli Waris Lahan SDN Duko 1Tuntut Rp.60 Juta Perkapling,” 2011.<https://sumenepkab.go.id/berita/baca/ahli-waris-lahan-sdn-duko-i-tuntut-rp-60-juta-per-kapling> .

Media Center Kota Palangkaraya. “Kawal Program Pembangunan Insfratuktur,” 2021.<https://mediacenter.palangkaraya.go.id/kawal-program-pembangunan-infrastruktur/>.

